



Edisi I 2023

BULETIN KIPRAH KALTARA

KINERJA PEMIMPIN DAERAH KALTARA



Kaltara untuk Indonesia

Daftar Isi



4 Masa depan industri
Energi Hijau
Indonesia



6 Awal Transformasi
Ekonomi Hijau
Indonesia



23 Jamin budaya
lokal dilindungi
negara



27 Dekatkan
pelayanan
kesehatan di
pedalaman

- COVER	1
- EDITORIAL	3
- KALTARA RUMAH KITA	
• Masa depan industri Indonesia	4
• 100 ribu lebih tenaga kerja	5
• Awal transformasi ekonomi hijau Indonesia	6
• Transfer fiskal berbasis ekologi	7
• Kepiting bakau 'branding' utama	9
• Berdayakan UMKM lokal di e-katalog	10
• Tiga agenda wisata masuk KEN 2023	11
• Gubernur dinobatkan 'People of The Year'	12
• Jaga pertumbuhan ekonomi-stabilkan inflasi	14
• Ekonomi melesat di atas inflasi	16
• Peluang PAD dari perdagangan karbon	18
• Himpun PAD dari PL migas	19
• Provinsi dengan realisasi PAD tertinggi	20
- KALTARA DI HATI	
• Komoditas perikanan unggulan siap dipasok ke IKN	22
• Jamin budaya lokal dilindungi negara	23
• Produksi cabai rawit surplus	24
• Pulih ke level 5,34 persen	26
• Dekatkan pelayanan kesehatan di pedalaman	27
• Pastikan nakes diberi booster kedua	28
• Raih penghargaan cakupan kesehatan menyeluruh	29
• Dorong realisasi daerah otonomi baru	30
• Gunung batu Benau jadi geopark	31
• Optimalkan peran PLBN	32
• Usia produktif 70 persen, Kaltara masuki bonus demografi	34

Redaksi

Pengarah

- Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Utara

Penanggungjawab

- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara

Redaktur

- Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
- Koordinator Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara

Editor

- Sub Koordinator Komunikasi dan Penyedia Informasi Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara
- Sub Koordinator Penetapan Materi Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara
- Sub Koordinator Dokumentasi Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara

Reporter

- Staf pelaksana Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara

Fotografer

- Staf pelaksana Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara

Perwajahan

- Staf Pelaksana Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Utara

Editorial

Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Utara 2023 telah kami tetapkan sesuai tema/fokus pembangunan dalam RPJMD. Tema/fokus pembangunan provinsi ke-34 Pada 2023 ini "Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal".

Ini mengisyaratkan arah pembangunan pada pengembangan dan penguatan industri secara luas yang meliputi: industri primer, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pertambangan.

Lalu industri pengolahan, industri ketenagalistrikan, industri perdagangan dan jasa; industri pariwisata dan ekonomi kreatif; industri kecil dan menengah, dan industri lainnya.

Industri-industri ini-lah yang menopang hajat hidup masyarakat sekaligus sebagai industri yang mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara serta nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industrinya.

Isu strategisnya lainnya adalah perekonomian Kalimantan Utara bertumpu pada ekonomi primer yang memproduksi bahan mentah dari sumber daya alam yang tersedia, seperti pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan dan sejenisnya, kemudian diekspor atau dikirim ke luar daerah atau negara.

Dari kondisi ini nilai tambah yang terjadi bukan dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Utara melainkan mereka yang di luar wilayah Kalimantan Utara. Bertolak dari pemikiran ini maka perlu untuk melakukan reorientasi atau perubahan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada menuju hilirisasi yang mendukung penciptaan kesempatan kerja. Ini merupakan perubahan peran dari sekedar pemasok bahan mentah menjadi pengolah bahan mentah dari sumber daya yang ada tersebut.

Intinya mencoba meningkatkan nilai tambah untuk membesarkan hasil pembangunan ekonomi yang tercermin dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PD RB).

Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang membuka lebar berbagai kemudahan untuk melakukan investasi, tentu akan menjadi lebih mudah dicapai sinergi kebijakan pusat-daerah yang terpadu untuk meningkatkan investasi di Kalimantan Utara.

Isu strategis yang dikemukakan bukan hanya mengejar peningkatan intensitas kegiatan ekonomi saja, melainkan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Frasa ini bermakna peningkatan kegiatan perekonomian harus dapat menciptakan kerja, bukan semata industri yang padat modal.

Industri yang diizinkan berkembang dan hadir adalah industri yang sebesar-besarnya menggunakan tenaga kerja masyarakat lokal sehingga pada waktunya akan menambah penghasilan, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat.

Kami dan kita semua berharap pembangunan yang terencana mampu berjalan pada jalur yang positif didukung segenap masyarakat Kalimantan Utara yang pada gilirannya, sesuai ucapan Presiden RI Joko Widodo bahwa "Masa depan Indonesia ada di sini, di Kalimantan Utara". *

Masa Depan Industri Energi Hijau Indonesia



Presiden RI Joko Widodo (tengah) memeriksa Kawasan Industri Park Indonesia (KIP) di Bulungan yang telah diresmikan pada tanggal 28 Februari 2023. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Wakil Ketua DPR RI) Purnomo Djojo, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Kalimantan Utara Zaini Arifin, Bupati Bulungan Sarwani, (BERKALARA.COM/GETPRES)

Presiden Joko Widodo meninjau Kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIP) di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Selasa, 28 Februari 2023. Usai peninjauan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan industri hijau terbesar di dunia yang mampu menjadi masa depan Indonesia dalam pembangunan industri energi hijau (*green energy*).

"Ini kawasan Industrial Park Indonesia yang semuanya seluas 13 ribu hektare yang nantinya ini dipersiapkan untuk pembangunan industri EV baterai yang pertama. Yang kedua, untuk pembangunan petrokimia (*petrochemical*). Kemudian yang ketiga, untuk pembangunan industri aluminium. Yang semuanya kita harapkan nanti didukung oleh energi hijau, oleh *renewable energy*, oleh *hydropower* dari Sungai Mentarang, Sungai Kayan di Kalimantan Utara," ujar Kepala Negara.

Lebih lanjut, Presiden meyakini bahwa nantinya kawasan tersebut dapat menghasilkan produk-produk hijau yang bersaing. Presiden menilai, hal itu akan menjadi kekuatan bagi kawasan industri hijau tersebut.

"Kita harapkan dengan kekuatan kompetitif seperti itu, energinya hijau, kemudian barang-barang produknya yang dihasilkan juga produk-produk hijau. Inilah yang akan menjadi kekuatan kawasan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara," tutur Presiden.

Presiden pun mengatakan bahwa kawasan KIP mampu menjadi masa depan Indonesia yang dapat menjadi daya tarik bagi industri yang memproduksi produk hijau.

"Masa depan Indonesia ada di sini kalau ini terealisasi dengan baik. Semuanya pasti akan bertondong-bondong ke sini, industri apapun yang berkaitan dengan green product pasti akan menengok ke kawasan ini," ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa ia akan terus memantau progres pembangunan kawasan industri hijau tersebut. Presiden memastikan agar pembangunan kawasan KIP dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

"Progres ini akan saya ikuti terus perkembangannya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sehingga betul-betul tidak meleset dari *schedule* yang telah kita tentukan. Saya kira kalau melihat lapangan, kelihatannya saya tadi tanya di lapangan tidak ada masalah. Perizinan semuanya sudah komplet, sudah siap," tutur Kepala Negara.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Utara Zaini Arifin, Paliwang, dan Bupati Bulungan Sarwani. (Birosetpres/Adpim)



Sekeluas lintasan di Telukmuring, Kalimantan Utara akan menjadi kawasan industri hijau. Di lokasi ini akan berdiri rumah-rumah yang akan menjadi kawasan industri hijau. (BAGAS/ANP)

100 Ribu Lebih Tenaga Kerja

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada kunjungan di Bulungan 21 Desember 2022 mengatakan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara membutuhkan 100 ribu tenaga kerja. Dia pun meminta menteri dan kepala daerah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung kawasan ini.

"Karena ini membutuhkan SDM-SDM yang memiliki kualifikasi yang baik. Siapkan mulai dari sekarang, dalam masa konstruksi. Tadi disampaikan bahwa akan muncul kurang lebih 100 ribu tenaga kerja yang dibutuhkan," kata Jokowi saat groundbreaking Kawasan Industri Hijau Indonesia di Bulungan.

Kepala Negara memprediksi kebutuhan SDM untuk mendukung kawasan tersebut akan bertambah seiring meningkatnya produksi di Kawasan Industri Hijau Indonesia.

"Perkiraan saya lebih dari 200 ribu plus anak cucu turunan dari produk produk yang dihasilkan," ujarnya.

Kawasan industri ini akan menggunakan teknologi-teknologi mutakhir atau berteknologi

tinggi. Presiden berharap Kawasan Industri Hijau Indonesia menjadi yang terbesar di dunia.

"Semuanya akan muncul dari Kalimantan Utara ini, kawasan ini dan ini kerja sama besar antara Indonesia, investor Indonesia, investor dari China, investor dari Uni Emirat Arab," tuturnya.

"Semuanya akan bergabung dan ini kita harapkan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar dunia. Bukan Kalimantan Utara, bukan Indonesia, tapi dunia karena menyangkut lahan sampai detik ini 16.400 hektare dan targetnya adalah 30 ribu hektare," sambung Presiden. **(Biosetpres/Adpim)**

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah sangat mendukung rencana transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, salah satunya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk yang terintegrasi dengan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara (Kaltara).

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sambutannya saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking PLTA Mentarang Induk PT Kayan Hydropower Nusantara, di Malinau, Kaltara, Rabu 1 Maret 2023.

"Karena energinya hijau, produk-produk yang dihasilkan nanti yang di Bulungan, di Kawasan Industrial Park Indonesia di Bulungan, juga produk-produk hijau, produk-produk yang emisinya karbonnya rendah, produk-produk yang memiliki harga yang premium tetapi kompetitif. Karena apa? Energinya dari energi hijau dari Sungai Mentarang di Kabupaten Malinau," ujar Presiden.

Kepala Negara menyampaikan, integrasi dari kawasan Sungai Mentarang menuju kawasan KIPI di Kabupaten Bulungan bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Selain itu, proyek tersebut juga membutuhkan anggaran yang tidak kecil, yaitu sekitar Rp 40 triliun.

"Kawasan yang terintegrasi dari Mentarang, kemudian disambungkan dengan kawasan yang ada di Bulungan, yang kurang lebih 300-an kilometer disambungkan oleh transmisi. Ini bukan pekerjaan yang mudah dan membutuhkan anggaran biaya yang tidak kecil 2,5 miliar Dolar AS, kalau dirupiahkan kira-kira Rp 40 triliun, sebuah nilai yang sangat besar sekali," ujarnya.

Presiden Jokowi menuturkan adanya kawasan kawasan tersebut akan mendukung rencana besar Indonesia dalam melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau.

Sebelumnya, Presiden juga telah meninjau kawasan KIPI yang dinilai sudah dalam keadaan siap.



Awal Transformasi Ekonomi Hijau Indonesia



Presiden RI Joko Widodo bersama PM, Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri Sabah, Gubernur Kaltara, dan para Kepala Badan Indonesia menandatangani MoU tentang pembangunan PLTA Mentarang Induk di Kabupaten Malinau, 1 Maret 2023. (YURI GUNAWAN/SETRADA)

Tunjukkan Kerja Sama Indonesia-Malaysia

Rabu 1 Maret 2023 adalah hari bersumpah di Kalimantan Utara. Sebab, Presiden RI Joko Widodo secara resmi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk PT Kayan Hydropower Nusantara, di Kabupaten Malinau.

"Hari ini saya sangat, sangat, sangat senang sekali karena PLTA Mentarang Induk dimulai pekerjaannya, dimulai konstruksinya," ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden juga mengaku gembira karena infrastruktur ini dapat dibangun atas kerja sama antara Indonesia dan Malaysia.

"Dan, yang saya lebih senang karena ini diberikan oleh konsorsium Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa kita sebagai saudara serumpun betul-betul bisa bekerja sama dengan baik," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung proyek pembangunan ini.

"Saya sangat menghargai tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Malinau, utamanya suku besar, Suku Dayak yang memberikan dukungan penuh pada proyek ini. Kita harapkan, kita semuanya mendapatkan manfaat yang besar dari proyek terintegrasi yang ada di Mentarang dan yang ada di Kabupaten Bulungan," ucapnya.

Presiden pun mengharapkan pembangunan PLTA ini dapat segera diselesaikan sehingga manfaatnya juga dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

"Tujuh tahun akan selesai dan kita harapkan belul-belul memberikan manfaat kepada Kabupaten Malinau, kepada Provinsi Kalimantan Utara, dan kepada seluruh rakyat kita Indonesia," tandasnya. (Birosetpres/Adpim)

Transfer Fiskal Berbasis Ekologi dan Insentif Hijau



Chusnul Huda, Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai, dan Wakil Bupati Kutai Timur bersama masyarakat menanam mangrove di Pantai Long Gawa, Kutai Timur, pada 11 Oktober 2023. Foto: Humas Pemkab Kutai Timur/Agus Hidayat

Pemprov Kalimantan Utara menerapkan transfer fiskal berbasis ekologi kepada kabupaten/kota dan 2023 adalah tahun keempat program ini berjalan. Transfer fiskal ini untuk menjaga dan meningkatkan perbaikan lingkungan di daerah.

Skema transfer ini disebut Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi dan Insentif Hijau Terintegrasi Kalimantan Utara (TAPE DI HATIKU) merupakan reformasi atas penyaluran dana bantuan keuangan/hibah dari provinsi kepada kabupaten/kota, dimana penyaluran dana disertai pertimbangan atas rencana kabupaten/kota yang mendukung pelestarian lingkungan dan fungsi-fungsi ekologi.

Kalimantan Utara menjadi provinsi pertama yang menerapkan instrumen ini. Ada beberapa tahap pelaksanaan program ini, dimulai dari persiapan masing-masing kabupaten/kota juga bisa melakukan self-assessment untuk memperkirakan skor atau nilai yang dapat diperoleh.

Alokasi total TAPE DI HATIKU ditentukan oleh pemerintah provinsi dan pagu bagi masing-masing kabupaten/kota akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas usulan yang diajukan ke provinsi.

Beberapa kriteria dan indikator disusun untuk membantu penentuan besar dana bantuan yang akan diterima oleh masing-masing kabupaten/kota.

Aca lima kriteria penilaian skema program ini yaitu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Area Penggunaan Lain (APL), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pengelolaan Sampah, Perlindungan Air, dan Pencemaran Udara.

"Dari lima indikator itu terdapat 17 item tunjangan yang harus diperbaiki," kata Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.

Pada 2022, Pemprov Kalimantan Utara menyalurkan kurang lebih Rp2 miliar bantuan

TAPE DI HATIKU kepada Pemkab/Pemkot berdasarkan perbandingan hasil penilaian indikator.

Tahun kemarin Kabupaten Nunukan paling teratas dan diberi bantuan Rp1,56 miliar. Disusul Kota Tarakan Rp1,51 miliar, Kabupaten Bulungan Rp1,49 miliar, Kabupaten Malinau Rp1,32 miliar, dan Kabupaten Tana Tidung Rp1,13 miliar. TAPE 2023 tengah dalam proses persiapan penilaian (Adpim).

Pagu Anggaran Bankeu Khusus TAPE DI HATIKU 2022

Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi dan Insentif Hilau Terintegrasi

Nunukan

Indeks
3,84



Pagu
Rp 1,56 miliar

Tarakan

Indeks
3,73



Pagu
Rp 1,51 miliar

Bulungan

Indeks
3,66



Pagu
Rp 1,49 miliar

Malinau

Indeks
3,62



Pagu
Rp 1,32 miliar

Tana Tidung

Indeks
2,74



Pagu
Rp 1,13 miliar

Skema bankeu Pemprov Kalimantan Utara kepada Pemkab/Pemkot menggunakan indikator kinerja daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lima kriteria tersebut:

- Pencegahan dan Pengendalian Karhutla
- Perlindungan Air
- Ruang Terbuka Hijau
- Pencemaran Udara
- Pengelolaan Persampahan



Pagu Anggaran Bankeu Khusus Tahun 2022

Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis di Kalimantan Utara



Nunukan

Indeks 3,84
Pagu 1,56 Miliar



Tarakan

Indeks 3,84
Pagu 1,56 Miliar



Bulungan

Indeks 3,84
Pagu 1,56 Miliar



Malinau

Indeks 3,84
Pagu 1,56 Miliar



Tana Tidung

Indeks 3,84
Pagu 1,56 Miliar

Kepiting Bakau “Branding” Utama



Sutrisna Zaini, A. P. Kepala Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kepiting bakau yang ditangkap di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat yang akan dikirim ke Kaltara. (SIPRI/PRM)

Salah satu dari banyak potensi perikanan Kalimantan Utara adalah kepiting bakau, bakal dijadikan branding unggulan provinsi. Rencana ini tidak lanjut dari instruksi Mendagri Tito Karnavian agar setiap daerah memunculkan branding produk unggulannya.

“Sesuai arahan Pak Mendagri beberapa waktu lalu pada saat rapat infasi semua daerah diminta siapkan potensi andalan yang bisa jadi branding daerah itu. Kita coba munculkan kepiting karena hasil perikanan ini jadi andalan Kalimantan Utara sudah sejak lama,” kata Zaini.

Untuk merealisasikan akan dibentuk tim terkait terdiri atas organisasi perangkat daerah serta tokoh masyarakat membahas wacana tersebut secara lebih dalam.

Jika disetujui semua pihak, Gubernur juga merancang perbarungan Tagu Kepiting yang konik di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, bukota Kalimantan Utara.

“Akan kita susun rencana induk dulu dan bermusyawarah dengan para tokoh apakah kepiting itu dapat kita jadikan ikon yang betul-betul menjual tidak saja di level nasional tetapi sampai internasional,” tuturnya.

Mendagri mendorong daerah tidak hanya mengumbar slogan seperti kota indah, bersih, dan berseri. Tetapi harus membuat langkah nyata dengan membuat branding potensi keunggulan daerah.

“Misal branding Kalimantan Utara adalah kepiting bakau, maka pengembangan dari hulu hingga hilirnya harus berjalan mulai dari usaha pembibitan, perawatan, panen, sampai menjadi produk-produk turunan kepiting. Selama ini kepiting langsung diekspor saja,” ujar Gubernur.

SEJALAN ARAHAN PRESIDEN

Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) menciptakan branding daerahnya sesuai dengan produk unggulan yang dimiliki. Hal itu sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 pada 17 Januari 2023.

“Beliau (Presiden) meminta semua daerah untuk memikirkan agar membuat program atau master plan. Istilahnya yang paling gampang membuat image atau branding daerah itu sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah,” kata Mendagri.

Mendagri juga mendorong Pemda bekerja tidak sebatas membuat slogan sebagai kota bersih, indah, atau berseri saja. Namun juga harus diimbangi dengan memiliki produk spesifik.

Titik mencontohkan Kota Davao di Filipina yang terkenal dengan produk unggulan pisang. Ekosistem agribisnis yang saling mendukung mulai dari penanaman, pembibitan, produksi, hingga distribusi dikembangkan dengan baik.

“Sampai dengan turunan produksinya, empingnya (keripik), salainya, dan dijual marketing-nya, semua dibuat. Masyarakat dilibatkan dan kemudian bahkan branding kota itu mengenai pisang, dan kemudian ada juga seni budaya tentang pisang. Misalnya itu, larutnya.

Contoh lain yang diberikan yakni Kota Minneapolis di Amerika Serikat yang dikenal sebagai tujuan para pegolf seluruh dunia untuk menyalurkan hobinya. Di kota ini, semua penduduk dilibatkan dalam bisnis penyelenggaraan golf.

Dari dalam negeri sendiri Mendagri mencontohkan Kota Jepara yang terkenal dengan produk mebelnya. Ada pula daerah lain yang terkenal dengan produksi ikan. Ia berharap setiap daerah di Indonesia bisa menciptakan branding produk unggulan seperti yang dicontohkan tersebut. (Adpina)



Berdayakan UMKM Lokal di E-Katalog



Keberhasilan di berbagai kota-kota lain, Pemprov Kaltara juga telah meluncurkan E-Katalog di Kota Kutai Kalimantan Utara pada 2021 silam. Pemprov Kaltara terus mendorong pertumbuhan UMKM salah satunya dengan berkolaborasi dengan LKPP Provinsi Kaltara.

Melalui e-katalog ini, pemerintah diwajibkan membeli produk UMKM, mulai dari kuliner hingga lesyem, sehingga geliat ekonomi lokal kian meningkat.

E-katalog itu memuat informasi terkait usaha, harga dan profil penyedia barang dan jasa. Dengan e-katalog itu diberlakukan aturan kewajiban belanja 40 persen barang/jasa pemerintah dari UMKM.



Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) didorong mendaftarkan produk dan jasa mereka ke dalam katalog elektronik atau e-katalog lokal yang dikelola oleh Pemprov Kalimantan Utara.

Derongan ini dilakukan dengan maksud memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, terutama produk UMKM lokal oleh pemerintah daerah. Hal ini berkesesuaian dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Merealisasikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemprov Kalimantan Utara juga mendorong para pelaku UMKM mempelajari teknologi digital guna memperluas jaringan dan promosi produk mereka.

E-katalog adalah aplikasi belanja daring yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi tersebut menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM, serta mempercepat penyerapan APBN dan APBD.

Penyelenggaraan katalog elektronik diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tata cara penyelenggaraannya diatur dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022.

Ada tiga jenis e-katalog yang dikelola oleh pemerintah: Katalog Elektronik Nasional yang dikelola oleh LKPP, Katalog Elektronik Sektoral yang dikelola oleh kementerian/ lembaga, dan Katalog Elektronik Lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah (pemda).

E-katalog menawarkan proses pengadaan barang dan jasa lebih cepat, lebih mudah dan lebih transparan. *(Adipin)*

Tiga Agenda Wisata Masuk KEN 2023



Persembahkan Iraw Teng kayu, tempat beristirahat masyarakat suku Iraw Teng, sebagai salah satu agenda wisata.

Tiga agenda pariwisata Provinsi Kalimantan Utara masuk daftar Khairisma Event Nusantara (KEN) 2023 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. KEN 2023 diluncurkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di Jakarta pada 28 Januari 2023.

Tiga agenda pariwisata itu adalah Iraw Teng kayu (Tarakan), Gelar Budaya Adat Dumut (Tarakan), dan Musik Alam Fest 2K23 (Tanjung Selor). Iraw Teng kayu dan Musik Alam Fest sebelumnya juga telah masuk pada KEN 2022.

Keliga agenda pariwisata itu diharapkan mendorong kunjungan wisatawan secara signifikan baik domestik maupun mancanegara. Apalagi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi COVID-19 telah dicabut oleh Presiden Joko Widodo.

"Kami optimistis jumlah wisatawan yang datang akan jauh lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Bahkan agenda-agenda pariwisata ini berpotensi mendatangkan kunjungan wisatawan dari negara-negara tetangga di kawasan ASEAN," tutur Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dr. Yansen R. M.Si.

Agar antusias masyarakat dan kunjungan wisatawan bertumbuh positif, Dinas Pariwisata Kalimantan Utara bersama Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya berkomitmen melaksanakan promosi dan sosialisasi agenda KEN 2023 secara intensif.

Ia optimistis agenda KEN 2023 membawa dampak positif industri pariwisata serta pemulihan ekonomi domestik yang pada gilirannya turut memberi kontribusi positif untuk nasional.

"Seluruh mata rantai industri pariwisata akan bergerak. Sektor UMKM akan bergerak, industri perhotelan, transportasi, makan minum, termasuk jasa-jasa dan industri kreatif lain," tuturnya.

Untuk diketahui Iraw Teng kayu merupakan upacara tradisional masyarakat Suku Tidung di Tarakan dengan menghanyutkan sesaji ke laut dan diisi berbagai macam persembaan.

Acapun Gelar Adat Dumut merupakan agenda yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat Gabungan Masyarakat Selumit (Gawas). Kegiatan masyarakat Suku Tidung ini menampilkan kesenian dan kebudayaan yang dilakukan di darat sehingga dinamakan Dumut.

Musik Alam Fest merupakan pertunjukan kolaborasi seni, budaya, dan musik tradisional yang dilaksanakan di alam terbuka. Musik Alam Fest telah digelar oleh sekelompok aliansi komunitas pemuda di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sejak tahun 2017. (Adpini)

Tiga agenda pariwisata itu adalah Iraw Teng kayu (Tarakan), Gelar Budaya Adat Dumut (Tarakan), dan Musik Alam Fest 2K23 (Tanjung Selor). Iraw Teng kayu dan Musik Alam Fest sebelumnya juga telah masuk pada KEN 2022.



Gubernur Dinobatkan “People of The Year 2022”

Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum dianugerahi penghargaan *People of The Year 2022*. Anugerah ini diberikan stasiun televisi swasta nasional, Metro TV, bertepatan dengan hari jadinya ke-22 tahun.

Gubernur Zainal mendapatkan penghargaan *Governor of The Year for Health and Environmental* atas keberhasilannya membangun Kawasan Industri Hijau (*Green Industrial Park*) di Tanah Kuning-Mangkupadi dan memberkahi pelayanan kesehatan di perbatasan dengan memanfaatkan layanan Dokter Terbang.

Tidak hanya itu, terkait instalasi pengolahan air limbah, Gubernur Zainal berhasil menghentikan aktivitas operasional perusahaan pertambangan yang tidak melaporkan pengelolaan lingkungan pertambangan kepada pemerintah daerah.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kaltara, bersama-sama kita bisa meningkatkan kesehatan kita dalam hidup sehari-hari. Dan untuk OPD-CPD terima kasih atas semua dukungan sehingga penghargaan ini bisa kita raih. Terima kasih Metro TV. Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-22” ujar Gubernur saat menerima trofi penghargaan, Kamis, 24 November 2022 di Jakarta.

Mengangkat tema “Bangkit, Bergerak Bersama”, Metro TV *People of The Year 2022* memberikan penghargaan kepada sosok teladan bagi bangsa untuk bersama-sama bangkit dan bergerak menuju Indonesia Emas. (Adpim)



Gubernur Zainal A. Paliwang menerima trofi penghargaan dari stasiun televisi swasta nasional Metro TV sebagai Gubernur Kalimantan Utara "People of The Year 2022" dari Metro TV pada 24 November 2022. (YULAGE, BSKD/DPWH)



#kaltaradihati

PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARABerAKHLAK²
BerAKHLAK² BerAKHLAK²
BerAKHLAK² BerAKHLAK² BerAKHLAK²#bangga
malayani
bangsa

Penghargaan

Provinsi Kalimantan Utara Satu Tahun Terakhir

Tahun 2022 akan segera berakhir dan akan memasuki tahun baru 2023, banyak program-program Pemprov Kalimantan Utara telah berjalan sepanjang 2022 di bawah kepemimpinan Gubernur Drs. H. Zainal A. Paliwang SH, M.Hum dan Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si.



Penghargaan TOP Pembina BUMD diterima oleh Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang SH, M.Hum pada acara Top BUMD Awards 2022



Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) II Tahun Berjalan-turut oleh BPK RI sejak 2014



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meraih **Peringkat 5 Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Dalam Rangka BKN Awards 2022**



Penghargaan Kepala Daerah Inovatif Tahun 2022 Kepada Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang SH, M.Hum, Kategori Pelayanan Publik dengan inovasi Si Pelanduk Kilat Smart.



Pemerintah Provinsi Kaltara **Juara 3 Nasional Kategori TTG Unggulan** dalam Lomba Teknologi Tepat Suka (TTS) Nusantara Ke-23 Tahun 2022, Berupa Inovasi Akar Pakis Press Multiguna untuk Pertanian Hidroponik dan Organik.



Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai bentuk **apresiasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI** kepada Pemerintah Provinsi dalam Memacu Pertumbuhan Kreativitas dan Inovasi Kekeayaan Intelektual Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.



Penghargaan People of The Year 2022 Dalam Rangka Memperingati HUT ke-22 Metro TV kepada Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang SH, M.Hum yang Mendapatkan Penghargaan Governor of The Year for Health and Environmental.



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Meraih **Terbaik II dalam ajang Indonesia's SDGs Action Award Tahun 2022** kategori Pemerintah Provinsi.



Penghargaan Terbaik I Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2022 Kategori Kecil Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.



Jaga Pertumbuhan Ekonomi-Stabilkan Inflasi

Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H.M.Hum menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik dan menekan inflasi agar tetap rendah dan stabil.

"Sebab kunci pengelolaan ekonomi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/cota adalah pertumbuhan ekonomi yang positif dan inflasi yang 'terjaga,' kata Gubernur Drs. H. Zainal di Tarakan, Kamis (9/3/2023).

Di Tarakan saat itu berkenaan kegiatan high level meeting (HLM) TPID Kalimantan Utara 2023. Kegiatan ini turut dihadiri Forkopimda Kalimantan Utara seperti Ketua DPRD, Kapolda, Danrem, Bupati/Walikota, Kepala Kantor Bank Indonesia, Kepala Badan Pusat Statistik, serta pimpinan instansi vertikal dan BUMN.

Gubernur memberi respons positif atas kehadiran unsur forkopimda dan peserta lain kegiatan ini. Untuk menurunkan inflasi ke level rendah dan stabil membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.

Ia mengingatkan perlunya koordinasi lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga terutama menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Identifikasi isu dan permasalahan sejak dini diharapkan berguna dalam mengantisipasi laju inflasi daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ekonomi Kalimantan Utara pada 2022 tumbuh 5,64 persen dibandingkan 2021. Dari sisi produk, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha akomodasi dan makan minum sebesar 10,94 persen.

Adapun dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai komponen ekspor barang dan jasa sebesar 6,56 persen.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Kalimantan 2022 tumbuh 4,49 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pertumbuhan 6,45 persen. Adapun Kalimantan Utara menempati posisi kedua dengan pertumbuhan sebesar 5,34 persen.

"Namun demikian kita perlu waspada karena pada Februari 2023 Kalimantan Utara mengalami inflasi 4,64," kata Gubernur Drs. H. Zainal.

Dengan dua kota Indeks Harga Konsumen (HK) yaitu Kota Tarakan dan Tanjung Selor masing-masing mengalami inflasi sebesar 4,10 persen (yoy) dan 6,76 persen (yoy). Inflasi periode Februari 2023 tersebut terutama disebabkan oleh



Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H.M.Hum berinteraksi dengan anggota TPID Kalimantan Utara saat HLM TPID Kalimantan Utara 2023 di Tarakan.

kelompok transportasi yang mengalami inflasi 15,28 persen (yoy). Khususnya pada sub komoditas pengoperasian peralatan transportasi pribadi yang menyumbang inflasi sebesar 19,87 persen.

Hal tersebut merupakan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang telah diputuskan pemerintah. Namun capaian inflasi Kalimantan Utara saat ini sangat baik, karena berada di bawah inflasi tahunan nasional yang sebesar 5,47 persen.

Dapat pula saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa, berdasarkan data andil inflasi sejak 2020, terdapat beberapa komoditas yang selalu memberikan andil terhadap inflasi Kalimantan Utara terutama dari komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai rawit, serta tomat, dan udang basah.

Oleh karena itu, komoditas-komoditas tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar tekanan inflasi pada bulan-bulan mendatang, khususnya menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dapat lebih terjaga. (Adpim)



Upaya Penanganan Inflasi oleh Pemprov Kalimantan Utara

- Menganggarkan kegiatan pengendalian inflasi antara lain melalui kegiatan pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dan gelar pangan murah
- Melaksanakan amanat belanja wajib bansos daerah yang telah ditetapkan melalui PMK NOMOR 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi SE Menteri Dalam Negeri Nomor 503/4825/SJ tentang Penggunaan BTT Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah Keputusan Menteri Desa dan PDTT Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pengendalian Inflasi Dan Mitigasi Dampak Inflasi di Desa
- Penganggaran Subsidi Ongkos Angkut (Soa) dari APBD sebesar Rp15,5 miliar
- Melakukan sidak pasar
- Inisiasi kerja sama antardaerah (KAD)
- Berkomunikasi intensif dengan maskapai penerbangan yang mana telah berdampak positif dengan terbukanya penerbangan maskapai Citilink dan Super Jet Air rute Tarakan-Ralikpapan dan sebaliknya



Arahan Gubernur dalam Upaya Pengendalian Inflasi

- Mengoptimalkan komunikasi publik, serta mengimbau masyarakat untuk tidak terjadi panic buying yang menyebabkan kondisi tidak kondusif
- Memaksimalkan peran serta meningkatkan sinergi dan koordinasi TPID kabupaten/kota dengan kepolisian, satgas pangan, Bulog, serta instansi terkait lainnya dalam rangka merumuskan upaya-upaya yang dibutuhkan dalam pengendalian inflasi di daerah sesuai kewenangan masing-masing
- Memaksimalkan peran satgas pangan untuk memantau harga-harga komoditas di lapangan, serta mengidentifikasi apa yang menjadi problem di masing-masing daerah
- Memastikan BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu
- Menggalakkan gerakan tanam pangan cepat panen
- Meningkatkan kerja sama antardaerah (KAD)



Ekonomi Melesat di Atas Inflasi



Kallara Press di Kalangan dari Gubernur UT Zainal Arifin Paliwang dan Kepala BPS RI Margo Yuwono di Gedung BPS Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 8 Februari 2023. Foto: BPS RI/SPS

Delapan provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi di atas tingkat inflasi, salah satunya Provinsi Kalimantan Utara.

"Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara 5,34 persen dengan tingkat inflasi yang rendah yakni 4,47 persen," kata Gubernur Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, 8 Februari 2023.

Provinsi Kalimantan Utara bertengger dengan Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat.

Gubernur mengatakan, 2020-2022 adalah tahun yang sangat berat di mana pandemi COVID-19 yang awalnya merupakan krisis kesehatan, secara cepat merambat menjadi pemicu permasalahan ekonomi dan sosial.

Sejak tahun 2020, Pemprov Kalimantan Utara didukung oleh pusat telah bekerja keras sebagai bentuk respon kebijakan fiskal yang cepat dan extraordinary untuk mengcounter dampak negatif pandemi.

Kerja keras seluruh lapisan di Kalimantan Utara menghasilkan pemulihan ekonomi secara bertahap. Pemprov juga berupaya keras menjaga tingkat inflasi agar tetap rendah.

"Dengan capaian ini, optimalisasi proses pemulihan ekonomi terus di jaga meski pun kita

harus makin waspada terhadap risiko global yang berasal dari faktor geopolitik," kata Gubernur Zainal.

Kepala BPS RI Margo Yuwono di Jakarta, Margo Yuwono pada Rakor Pengendalian Inflasi secara virtual yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian (8/2/2023) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara 5,34 persen dengan tingkat inflasi yang rendah yakni 4,47 persen.

Provinsi Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya melambat 15,17 persen dengan tingkat inflasi yang rendah hanya 5,96 persen. DKI Jakarta dengan pertumbuhan ekonomi 5,25 persen dengan tingkat inflasi 4,21 persen. (selengkapnya lihat grafis)

"Papua 8,97 pertumbuhan ekonominya, inflasinya hanya 6,68. Artinya secara agregat kalau pertumbuhan ekonomi di artikan secara makro adalah penambahan pendapatan dari masyarakat, berarti secara agregat pertumbuhan pendapatan yang dicerminkan pada pertumbuhan ekonomi, itu meningkat 8,97 persen dan lebih tinggi dibandingkan inflasinya," ujar Margo. (Adpim)

8 Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi di Atas Tingkat Inflasi

Papua

Pertumbuhan Ekonomi

8,97

Inflasi

5,68



Maluku

Pertumbuhan Ekonomi

22,94

Inflasi

3,37



Sulawesi Tengah

Pertumbuhan Ekonomi

15,17

Inflasi

5,96



Sulawesi Utara

Pertumbuhan Ekonomi

5,42

Inflasi

5,68



Kalimantan Tengah

Pertumbuhan Ekonomi

6,45

Inflasi

6,32



KALIMANTAN UTARA

Pertumbuhan Ekonomi

5,34

Inflasi

4,47



DKI Jakarta

Pertumbuhan Ekonomi

5,25

Inflasi

4,21



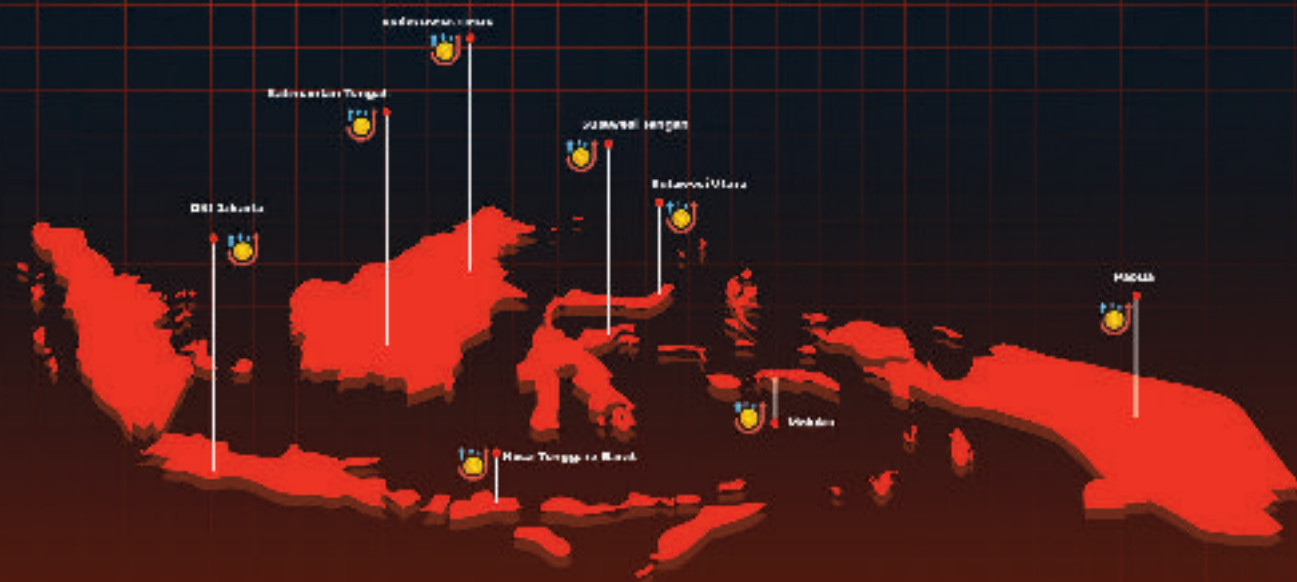
NTB

Pertumbuhan Ekonomi

6,95

Inflasi

6,23



Peluang PAD dari Perdagangan Karbon

Kalimantan Utara memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-III/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sekitar 5.629.110 hektare atau 74,54 persen dari luas daratan Provinsi Kalimantan Utara ± 75.457,70 km².

Dari potensi tersebut, Pemprov Kalimantan Utara akan berlusi perdagangan emisi karbon dioksida (carbon trade) dengan harapan membuka atau meningkatkan Pencapaian Asli Daerah (PAD) ke depan. Potensi carbon trade Kalimantan Utara cukup melimpah dengan anugerah alam hutan tropis dan hutan primer.

"Luasnya kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara merupakan potensi yang sangat besar bagi pengelolaan hutan untuk masyarakat dan keperlingan dunia," tutur Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Pahiawang, S.H., M.Hum.

Salah satunya adalah Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM). Taman ini ditetapkan sebagai Cagar Alam oleh Menteri Pertanian Indonesia pada tahun 1980. Dan pada tahun 1996, diubah menjadi Taman Nasional dengan tujuan agar kepentingan masyarakat lokal dapat diakomodasi. Nama Kayan Mentarang berawal dari dua nama sungai yang ada di kawasan tersebut yaitu, Kayan dan Mentarang.

Taman Nasional ini memiliki kawasan hutan terbesar dan terluas yang masih tersisa di Pulau Borneo. Dengan luas lahan sekitar 1,35 juta hektare telah membentang di Kalimantan Utara. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 200-2.500 meter di atas permukaan laut yang mencakup lembah-lembah dataran rendah, dataran tinggi pegunungan, serta pegunungan terjal.

Hutan Kayan Mentarang memiliki 500 jenis anggrek dan 25 jenis rotan. Juga telah ditemukan 277 jenis burung, 19 endemik dan 12 jenis burung yang hampir punah. Yang paling digemari pengunjung adalah melihat 7 jenis Enggang, Klau Raja, Sempekan Kalimantan dan jenis-jenis Raja Ulang. Di Hutan ini, juga ditemukan bertong, beruang madu, trenggiling, macan dehan, landak dan rusa sambar.

"Perdagangan karbon tentu akan memberikan sumbangsih yang besar bagi PAD sesuai kapasitas kewenangan pemprov. Selain itu, sejauh ini anugerah besar dari Allah SWT ke Kalimantan Utara mampu membantu masyarakat dunia menghirup udara segar dan mengurai polusi," tuturnya.



Gubernur Kalimantan Zainal Pahiawang bersama BBR mangrove. Pada saat yang sama akan melakukan kerja sama dengan masyarakat lokal untuk mengelola hutan mangrove di Kalimantan Utara.

No.	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Km ² /Ha)	RSJ/KOPA (Ha)	HL (Ha)	HPT (Ha)	HP (Ha)	HPK (Ha)
1	Bulungan	10.945,72	0	206.471,91	449.908,56	274.531,20	5.256,71
2	Tarakan	210,00	0	6.317,64	0	0	0
3	Narakun	19.841,50	284.074,83	150.460,23	165.718,86	274.103,22	14.098,87
4	Melina	42.620,70	449.027,50	696.610,61	1.545.923,51	375.557,43	37.174,10
5	Tara Tidung	4.025,55	0	0	9.054,23	150.432,33	9.570,05
Total		78.467,70	1.272.102,16	1.059.873,53	2.104.630,20	1.078.132,98	60.947,73

Gubernur meminta instansi terkait membahas lebih lanjut perdagangan karbon dengan pemerintah pusat bersama kelompok profesional dan kompeten.

Jumat 10 Februari 2023 di Tanjung Selor, ia bersama jajaran bahkan telah bertemu perusahaan penyedia solusi kecerdasan lingkungan dan pertumbuhan berkelanjutan global bernama *Leaonto Infrastructure Partners* Inc.

Perusahaan ini melakukan pengumpulan data, analisis, dan teknologi geospasial untuk membantu organisasi dan pemerintah membuat keputusan yang berwawasan lingkungan seputar masalah strategis ekologi, ekonomi, dan keamanan yang membantu meminimalkan dampak negatif terhadap bumi.

Di Indonesia, *Leaonto* telah menandatangani kontrak sepuluh tahun senilai \$357 juta USD dengan *Purusa Bali*, sebuah BUMD Bali, untuk menyediakan layanan Kecerdasan Lingkungan, Manajemen Modal Alam, dan Ekokultur Regeneratif yang komprehensif di seluruh pulau Bali. (Adpim)



Kaltara: Fasilitas pengaliran minyak dari gas bumi di lepas pantai Kalimantan Utara. 2020. FOTO: MUDAP/PT

Himpun PAD dari PI Migas

Tiga anak usaha dari holding atau induk BUMD Pemprov Kalimantan Utara ikut mengelola *participating interest* (PI) dan akan menghimpun pendapatan asli daerah (PAD) mulai 2023 ini.

Empat anak usaha sudah dibentuk. Dan tiga diantaranya sudah bisa menghasilkan PAD tahun ini dan keikutsertaan pengelolaan blok atau Wilayah Kerja (WK) migas, tutur Gubernur Kalimantan Utara, Drs. H. Zainal A. Paliwang S.H.M. Hum di Tanjung Selor.

Tiga anak usaha yang dimaksud adalah PT Migas Kaltara Jaya Tarakan Offshore (MKJTO), PT Migas Kaltara Jaya Tarakan (MKJT), dan PT Migas Kaltara Jaya Seimanggaris (MKJS).

Masing-masing anak usaha ini akan mengelola blok migas atau Wilayah Kerja (WK) bernama Tarakan Offshore (kontraktor kontrak kerja sama/KKS Manhattan Kalimantan Investment PTE LTD), WK Tarakan (KKS Medco E&P Tarakan), dan WK Seimanggaris (KKS Medco E&P Seimanggaris).

Adapun satu anak usaha lainnya adalah PT Migas Kaltara Jaya Nunukan (MKJN), diikutkan mengelola PI WK Nunukan dengan KKS Pertamina Hulu Energi Nunukan Company (PHENC).

Keempat anak perusahaan saat ini menunggu tahap pengisian direksi yang akan dilakukan oleh PT Migas Kaltara Jaya sebagai induk perusahaan dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Gubernur mengatakan PAD akan dihasilkan anak-anak perusahaan itu dari pengelolaan migas bersama KKS berdasarkan prinsip hak daerah PI 10 persen sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

"Sekarang berproses WK Tarakan dan WK produktif yaitu WK Tarakan Offshore dan WK Seimanggaris. Ketiganya sudah tahap eksploitasi dan produksi sejak tahun 2022. Sehingga di

tahun 2023 ini PAD sudah bisa dicatatkan," ujarnya.

Adapun WK Nunukan diperkirakan baru dapat menghimpun PAD dua hingga tiga tahun mendatang. Sebab, KKS di WK Nunukan yaitu PHENC baru menargetkan penjualan gas pada tahun 2025 nanti.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 PI 10 persen adalah besaran maksimal sepuluh persen PI pada kontrak kerja sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada BUMD atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

PI 10 persen adalah privilege atau hak istimewa kepada pemerintah daerah selain DBH (Dana Bagi Hasil) dari sektor migas. PI 10 persen akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi PAD. (Adplm)

Provinsi dengan Realisasi PAD Tertinggi



Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang (kanan) mengenai realisasi APBD tahun 2022. (SMA/AT/2023)

Pemprov Kalimantan Utara meraih penghargaan APBD Award 2023 sebagai provinsi dengan realisasi peringkat pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi 2022 di Tanah Air.

"Atas nama Pemerintah, saya mengucapkan rasa bangga dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022," kata Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo di Jakarta, Kamis.

Dalam rangka penguatan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah 2023 sekaligus Pemberian APBD Award 2023 bagi Pemerintah Daerah pada Kamis 16 Maret 2023.

Penghargaan ini diberikan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dr Tommy mewakili Gubernur Zainal A Paliwang.

Di bawah Kalimantan Utara, provinsi dengan realisasi peringkat PAD tertinggi ditempati Provinsi Kepulauan Riau (peringkat kedua), disusul Provinsi Kalimantan Barat (peringkat ketiga), Provinsi Bali (peringkat keempat), dan Provinsi Kalimantan Timur (peringkat kelima).

Acapun penghargaan provinsi Kategori Realisasi Belanja Tertinggi APBD 2022 diraih oleh Lampung (peringkat pertama), Kepulauan Riau (peringkat kedua), Jawa Barat (peringkat ketiga), Kalimantan Barat (peringkat keempat), dan Jawa Tengah (peringkat kelima).

Sedangkan provinsi Kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi APBD 2022 diraih Kalimantan Timur (peringkat pertama), Bangka Belitung (peringkat kedua), Sulawesi Tenggara (peringkat ketiga), Kalimantan Barat (peringkat keempat), dan Jawa Timur (peringkat kelima).

John Wempi Wetipo mengatakan upaya pemaksimalan realisasi APBD sejak awal tahun perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan belanja rumah tangga yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Selain itu dengan lancarnya belanja APBD tersebut akan mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang lebih baik.

Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan realisasi pendapatan negara APBN tahun anggaran 2022 sebesar 115,90 persen atau Rp2.626 triliun. Sementara realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 97,76 persen atau Rp1.168 triliun. Realisasi pendapatan daerah tersebut meningkat

1,60 persen dari realisasi pendapatan 31 Desember 2021 yaitu sebesar 96,16 persen atau Rp1.123 triliun.

Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum mengatakan pajak daerah merupakan sumber PAD yang utama bagi Kalimantan Utara dengan rasio 68,24% dari total PAD.

Secara garis besar, PAD Provinsi Kalimantan Utara dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk diketahui, komponen PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Pajak Daerah yang merupakan kewenangan provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Jika dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan, pajak daerah masuk cukup kecil hanya pada kisaran 19,55% dari total pendapatan 2023. (Adpim)



#kaltaradihati



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Meraih

APBD AWARD 2023

Atas Capaian Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Tanah Air.

Oleh Wakil Menteri Dalam Negeri

John Wempi Wetipo

Kepada Gubernur Kalimantan Utara

Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum

diwakili oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Utara

Dr. Tomy Labo, S.E., M.Si

JAKARTA 16 MARET 2023



PROVINSI DENGAN REALISASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERTINGGI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 2022

1



KALIMANTAN UTARA

2



KEPULAUAN RIAU

3



KALIMANTAN BARAT

4



BALI

5



KALIMANTAN TIMUR





Gubernur Kalimantan Utara Zulkhaifi Paliwang memeriksa hasil budidaya udang windu dari petani lokal. (Dokumentasi: Tim Bakti Sosial BPSD Kalut) Gubernur Kalimantan Utara memonitor potensi ekonomi komoditas perikanan unggulan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Negara Nusantara. (13/05/2024)

Komoditas Perikanan Unggulan Siap Dipasok ke IKN

Selain memenuhi kebutuhan dalam daerah, Kalimantan Utara kini can ke depan siap menyuplai dan memenuhi kebutuhan pangan Ibu Kota Negara (IKN) dari empat komoditas andalan hasil kelautan dan perikanan yakni kepiting, udang windu, ikan bandeng, dan rumput laut.

"Selain untuk ekspor, Kalimantan Utara tentu sangat siap untuk suplai pangan dari hasil kelautan dan perikanan yang kita miliki untuk IKN Nusantara," kata Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zulkhaifi A. Paliwang, S.H., M.Hum.

Bahkan selain IKN, Kalimantan Utara siap memenuhi kebutuhan konsumsi hasil kelautan dan perikanan secara domestik ke 2,7 juta orang yang direncanakan akan bekerja di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KHI) Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan.

Kalimantan Utara memiliki garis pantai kurang lebih 3.500 km serta kewenangan pengelolaan sampai 12 mil laut atau setara kurang lebih 776 ribu hektare. Provinsi ini juga memiliki 196 pulau-pulau kecil yang sangat potensial dijadikan tambak.

Potensi udang windu Kalimantan Utara masih cukup besar dan sangat diminati Asia Timur dan Timur Tengah. Udang windu Kalimantan Utara dibudidayakan secara organik dan tradisional.

Tahun 2020 berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara produksi udang windu mencapai 8.757 ton dengan nilai ekonomis mencapai Rp886,6 miliar.

"Selingga kalau kita berbicara komoditas yang tidak tersentuh zat kimia itu akan dicari orang. Kami komunikasi dengan beberapa perusahaan cold storage mereka sepakat agar udang windu yang orisinal ini dijaga dengan baik," kata dia.

Acupun kepiting bakau juga menjadi komoditas unggulan Kalimantan Utara. Bahkan nilai ekonomisnya lebih tinggi dibanding udang windu.

"Kepiting yang dulunya menjadi hama, sekarang dicari. Harga kepiting pun sangat tinggi, bahkan diatas harga udang. Kemarin menjelang lelek di level nelayan harganya Rp300-400 ribu per kilogram. Sekarang harga udang ukuran 20 sekitar Rp150 ribu. Jadi masih tinggi kepiting," ujarnya.

Catatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara, daerah ini telah memproduksi kepiting sebanyak 756,57 ton pada tahun 2021 dari kawasan tambak milik masyarakat yang tersebar di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung.

Sedangkan ikan bandeng pada tahun 2020 berdasarkan catatan BPS Kalimantan Utara produksinya mencapai 4.180 ton dengan nilai ekonomis mencapai Rp61,8 miliar.

Secara historis, Kalimantan Utara sudah cukup dikenal dan familiar dengan bandeng. Komoditas ini sudah ekspor ke Cina, Jepang, bahkan sampai Qatar.

Komoditas andalan lainnya adalah rumput laut. Budidaya rumput laut terkonsentrasi di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan. Pada 2021 Kalimantan Utara memproduksi kurang lebih 62.000 ton rumput laut kering.

"Ini secara fakta ekonomi itu betul betul berkembang dari rumput laut. Kalau dikonversikan harga Rp20 ribu per kilogram, bahkan ada lebih dari harga itu, maka ada Rp1,2 triliun perputaran uang di Kalimantan Utara hanya dari hasil rumput laut," ujar Gubernur. (Adpian)

Jamin Budaya Lokal Dilindungi Negara



Gubernur Kalimantan Utara, H. Zainal A. Peliwang, S.H., M.Hum. bersama Gubernur TP Kaltara dan pejabat lainnya dalam salah satu pertunjukan budaya. (NOL/SP/PRD/ADP/AM)



Gubernur Kalimantan Utara, Drs. H. Zainal A. Peliwang, S.H., M.Hum. memastikan budaya lokal di Kaltara akan mendapatkan perlindungan negara. Ia menandatangani perlindungan budaya tersebut melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kekayaan budaya yang dimaksud Gubernur mulai dari segala adat istiadat, upacara tradisional, pakaian tradisional, musik dan tarian tradisional, termasuk permainan tradisional.

"Untuk menjaga supaya jangan ada negara lain mengklaim bahwa kegiatan kegiatan budaya ini milik mereka. Kita berupaya untuk meregistrasi seluruh potensi-potensi budaya misalnya batik, pakaian adat, dan kebudayaan lainnya akan kita daftarkan semua supaya dapat perlindungan negara," tutur Gubernur.

Gubernur menyebut Kalimantan Utara sangat kaya akan tradisi masyarakat, utamanya dari tiga suku yaitu Bulungan, Dayak, dan Tidung. Ia juga memberi apresiasi tinggi masyarakat karena

mampu menjaga dan memelihara warisan budaya leluhur di tengah gempuran globalisasi dan digitalisasi.

"Kami sangat mendukung pelestarian tradisi kebudayaan yang turun temurun dari leluhur masyarakat. Siapa lagi yang akan melestarikan yang akan menjaga, dan menyikapi kalau bukan dari kita semua," ujarnya.

Orang nomor satu di Kaltara itu mengharapkan kekayaan adat istiadat Kalimantan Utara menjadi penguat dan narumen pemersatu dalam pembangunan daerah seperti sektor sumber daya manusia, sektor pariwisata, serta sosial ekonomi daerah ini.

"Waka mari terus jaga adat tradisi menjadi penguat pembangunan daerah, utamanya memantapkan pemulihan ekonomi dalam rangka mewujudkan Kaltara berubah, maju, dan sejahtera," tutur Gubernur. (Adpina)



Buena Zakaria Paliwang membagikan bibit jenis cabai rawit kepada petani dengan agenda penanaman cabai sebagai gerakan nasional pengendalian inflasi (Pestisera), di Tarakan beberapa waktu lalu. (PRC APBN)

Produksi Cabai Rawit Surplus

Provinsi Kalimantan Utara surplus cabai rawit hingga Mei 2023 berdasarkan catatan Kementerian Pertanian RI, sedangkan provinsi lainnya di Kalimantan diperkirakan mengalami defisit.

"Alhamdulillah kita berhasil surplus cabai rawit berkat pembagian bibit siap tanam secara massal kepada masyarakat yang kami laksanakan sejak Oktober 2022 baik melalui APBD maupun APBN," kata Gubernur Drs. H. Zairul A Paliwang SH.,M.Hum.

Provinsi Kalimantan Utara memang merencanakan penanaman cabai rawit di lahan seluas 25 hektare di Kabupaten Nunukan dan 50 hektare di Kota Tarakan demi menggenjot produksi sekaligus menekan inflasi.

Pengembangan cabai di Nunukan dan di Tarakan itu diawali dengan memberi bantuan bibit cabai siap tanam kepada kelompok-kelompok tani. Bantuan bibit berasal dari APBD Kalimantan Utara berkolaborasi dengan APBN.

Di Nunukan dan Tarakan, Pemprov melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga telah membagikan kurang lebih 50 ribu pohon bibit. Termasuk membagikan pupuk dan kegiatan pengembangan lainnya.

Di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Malinau, juga telah dibagikan bibit secara massal kurang lebih 59 ribu pohon.

"Kami juga membagikan 7.000 ribu pohon bibit cabai khueup bagi kelompok tani di Tanjung Palas Kabupaten Bulungan," ujarnya.

Produksi cabai rawit Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI, pada Januari 2023 mencapai 461 ton. Kemudian diprodusi pada Februari mencapai 406 ton, Maret 413 ton, April 349 ton, dan Mei mencapai 322 ton.

Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Prihasto Setyanto pada saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual, pada 20 Februari 2023 mengungkapkan bahwa hanya Provinsi Kalimantan Utara yang surplus cabai rawit di Pulau Kalimantan. Sedang empat provinsi lainnya mengalami defisit.

Tima bulan pada 2023 (Januari-Mei), Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI mencatat bahwa cabai rawit di Kalimantan Barat mengalami defisit dengan rincian 1.280 ton (Januari), 1.119 ton (Februari), 1.381 ton (Maret), 1.417 ton (April), dan 1.358 ton (Mei).

Adapun Kalimantan Tengah dengan rincian defisit 455 ton (Januari), 324 ton (Februari), 435 ton (Maret), 482 ton (April), 479 ton (Mei).

Kemudian Kalimantan Selatan mengalami defisit 115 ton (Januari), 165 ton (Februari), 430 ton (Maret), 448 ton (April), dan 474 ton (Mei). Sedangkan Kalimantan Timur defisit 706 ton (Januari), 525 ton (Februari), 850 ton (Maret), 654 ton (April), dan 643 ton (Mei).

Adapun catatan surplus cabai rawit di Kalimantan Utara yakni 216 ton (Januari), 185 ton (Februari), 168 ton (Maret), 102 ton (April), dan 73 ton (Mei).

"Secara umum cabai rawit masih surplus 52.402 ton secara nasional," kata dia.

Melalui peta early warning system (EWS) itu Direktorat Hortikultura mengharapkan jadi perhatian bagi pemangku kepentingan khususnya kepala daerah gubernur, bupati/walikota melihat situasi dan kondisi agar bisa mendorong penanaman komoditas cabai rawit.

"EWS ini juga kami teruskan kepada seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota," kata dia. (Adpim)

Pulih ke Level 5,34 Persen



Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara sepanjang 2022 tumbuh 5,34 persen atau secara rata-rata sering tren positif pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID 19.

"Untuk rata-rata, ekonomi Kalimantan Utara terus bertumbuh yang mana sebelumnya pada 2020 berkontraksi -1,09 persen, kemudian tumbuh 3,98 persen pada 2021 dan 5,34 persen pada 2022 kemarin. Tampaknya recovery ekonomi pasca COVID-19 terus positif," Gubernur Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum mengungkapkan catatan Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara.

Diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp138,72 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp66,53 triliun.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,34 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,56 persen.

Acap kali secara yoy, ekonomi Kalimantan Utara triwulan IV tahun 2022 bila dibandingkan triwulan IV tahun 2021 tumbuh sebesar 6,17 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,32 persen.

"Tetapi sumber pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022 masih didominasi pertambangan dan penggalian yakni 1,13 persen. Sumber pertumbuhan lainnya yang besar yaitu usaha pertanian 1,20 persen, dan perdagangan 0,89 persen," sebutnya.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara sepanjang 2022 dipengaruhi beberapa komponen yang tumbuh positif. Antara lain net ekspor tumbuh 6,54 persen, konsumsi lembaga Nirlaba Profit yang Melayani Rumah Tangga (LN^{NPRT}) 4,78 persen, konsumsi rumah tangga 4,6 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2,23 persen. (Adpim)



Gubernur Zainal A. Paliwang berinteraksi dengan pedagang kecil salah satu pedagang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. (Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara)

Dekatkan Pelayanan Kesehatan di Pedalaman

Warga pedalaman Provinsi Kalimantan Utara dipastikan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari Pemprov lewat program PRO LANTERAKU (Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara) di 2023 ini.

Program ini menyasar masyarakat 3T yaitu tertinggal, terditinggal, dan tertua. Pemerintah Kalimantan Utara melalui Dinas Kesehatan Kalimantan Utara sudah menyiapkan rencana wilayah sasaran jangkauan tahun ini.

Di Kabupaten Nunukan akan menjangkau Kecamatan Sei Menggaris, Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Lumbis Ogong, dan Kecamatan Sebatik Barat. Adapun di Kabupaten Malinau menjangkau Kecamatan Long Berang dan Kecamatan Long Ampung.

Pada 26 Januari 2023 tim Dinas Kesehatan sudah turun di Kecamatan Sei Menggaris melakukan skrining penyakit tidak menular. Tim menerjunkan dokter spesialis anak, spesialis penyakit dalam, serta spesialis obstetri dan ginekologi.

Lalu pada 8 Februari tim melanjutkan pelayanan ke Krayan Barat. Disusul 23 Februari di Long Berang, 8 Maret di Lumbis Ogong, 5 April di Sebatik Barat, dan 10 Mei di Long Ampung.

Pada 2022 lalu PRO LANTERAKU memberi layanan kesehatan gratis ke 652 warga dengan pembiayaan anggaran APBD Provinsi Kalimantan Utara mencapai Rp381,9 juta. Penyakit yang dominan dikeluhkan masyarakat adalah hipertensi, infeksi saluran pernapasan akut, common cold, dislipidemia, dispepsia, myalgia, gerd, hiperurisemia, dan scabies.

Gubernur Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum mengatakan inovasi ini merupakan salah satu solusi efektif memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat pedalaman. Sebab fasilitas kesehatan dan kondisi geografis daerah belum sepenuhnya mudah diakses.

"Beberapa daerah jangkauan hanya bisa diakses dengan pesawat perintis. Ada juga yang hanya bisa diakses menggunakan perahu. Tantangannya tidak mudah. Tetap teman-teman yang terlibat tidak patah menyerah dan terus memberikan pengabdian terbaik," tuturnya. (Adplim)



Tim kesehatan memberi layanan gratis pada warga pedalaman. Disamping dokter, ada bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. (Dinas Kesehatan Kaltara)

KEGIATAN PRO LANTERAKU 2023

26 JANUARI Kecamatan Sei Menggaris Nunukan	8 FEBRUARI Kecamatan Krayan Barat Nunukan
23 FEBRUARI Kecamatan Long Berang Malinau	8 MARET Kecamatan Lumbis Ogong Nunukan
5 APRIL Kecamatan Sebatik Barat Nunukan	10 MEI Kecamatan Long Ampung Malinau

10 BESAR PENYAKIT DIKELUHKAN MASYARAKAT

- Hipertensi
- ISPA
- Common cold
- Dislipidemia
- Dispepsia
- Myalgia
- Gerd
- Hiperurisemia
- OA / GA
- Scabies

Pada 2022, tim PRO LANTERAKU memberi layanan kesehatan gratis ke 652 warga dengan pembiayaan anggaran APBD Provinsi Kalimantan Utara mencapai Rp381,9 juta. Penyakit yang dominan dikeluhkan masyarakat adalah hipertensi, infeksi saluran pernapasan akut, common cold, dislipidemia, dispepsia, myalgia, gerd, hiperurisemia, dan scabies.

WALIKOTA NUNUKAN, 26 JANUARI 2023

Pastikan Nakes Diberi Booster Kedua



Wakil Bupati Pawan dan sejumlah pejabat tenaga kesehatan di Puskesmas Tanjung Selor, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, memberikan booster COVID-19 kepada nakes (RMD/ADP/22)

Provinsi Kalimantan Utara telah memberikan vaksin COVID-19 dosis booster kedua kepada 4.304 tenaga kesehatan atau nakes dari jumlah total sasaran 7.091 orang. Vaksin dosis booster kedua sudah dimulai sejak 24 Januari 2023 sesuai arahan Kementerian Kesehatan.

Selain tenaga kesehatan, vaksin COVID-19 dosis booster kedua juga telah diberikan kepada 35 orang petugas publik, 284 orang lanjut usia, dan 77 orang masyarakat umum dan rentan.

Vaksinasi COVID-19 dosis kedua dilakukan dengan mempertimbangkan data dan situasi epidemiologi kasus COVID-19 dan adanya varian baru.

Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum. Kalimantan Utara, meminta dukungan seluruh pihak pemerintah kabupaten/kota dan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara imunisasi baik pemerintah maupun swasta mendorong vaksinasi booster kedua ini.

Vaksin yang dapat digunakan untuk dosis booster kedua adalah vaksin COVID-19 yang telah mendapat Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat atau *Emergency Use Authorization (EUA)* dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta memperhatikan ketersediaan vaksin yang ada.

"Vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua diberikan dengan interval enam bulan sejak vaksinasi booster pertama atau kedua," ujarnya.

Kalimantan Utara secara umum memiliki 617.700 sasaran vaksinasi yang terdiri atas 7.091 tenaga kesehatan, 33.254 lanjut usia, 60.229 petugas publik, 367.207 masyarakat umum dan rentan, dan 77.891 orang usia 12-17 tahun.

Di Kalimantan Utara sampai 8 Februari 2023 jumlah penerima vaksin dosis kedua mencapai 531.288 orang, vaksin dosis kedua 453.026 orang, vaksinasi booster pertama 171.395, dan vaksin booster kedua 4.700 orang. (Adpim)



Raih Penghargaan Cakupan Kesehatan Menyeluruh



Wapres Mahfud MD menyerahkan trofi kepada Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang dalam acara Penghargaan Cakupan Kesehatan Menyeluruh Kalimantan Utara 2023 yang berlangsung di Gedung Sate, Jakarta, Selasa (14/03/2023). (BPM&P/Wahid AGENNES RI)



Pemprov Kalimantan Utara sukses mencapai cakupan kesehatan menyeluruh atau *Universal Health Coverage* (UHC), terhitung sejak 1 Februari 2023.

"Sebanyak 695.269 jiwa penduduk telah terdaftar Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 709.670 jiwa atau sebesar 97,89 persen," kata Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang di Jakarta, Selasa 14 Maret 2023.

Hampir seluruh warga masyarakat di Kalimantan Utara telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Zainal A. Paliwang mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Tarakan yang telah bekerja keras agar masyarakat Provinsi Kalimantan Utara bisa terjamin ke dalam Program JKN.

"Dengan telah tercapainya UHC di Kalimantan Utara maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kalimantan Utara tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS," ujar Zainal.

Untuk diketahui, Wakil Presiden Republik Indonesia Mahfud Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mencukupi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Menyeluruh atau UHC di Indonesia.

Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi JKN.

Dalam Instruksi Nomor 1 Tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan penyalangan iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Sampai 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia.



Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wapres didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03). (Adpim)

Dorong Realisasi Daerah Otonomi Baru

Misi ke-14 Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan RPJMD 2021-2026 adalah mewujudkan Tanjung Selor menjadi daerah otonomi baru (DOB) sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk itu, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dr. Yansen TP M.Si mendorong pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan percepatan pemekaran wilayah desa/kelurahan dan kecamatan dalam rangka memenuhi syarat kewilayahan pemekaran suatu daerah otonomi baru kabupaten/kota.

Tanjung Selor yang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berbunyi "ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Berkedudukan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan".

"Kenyataannya saat ini Tanjung Selor masih berstatus kecamatan. Sedangkan ibu kota sebuah daerah semestinya sebuah kota, kotamadya, Kota Tanjung Selor yang otonomi," ujar Wagub di Tanjung Selor, 28 Februari 2023.

Berdasarkan syarat kewilayahan yang diatur undang-undang, pemekaran daerah otonomi baru kota setidaknya memiliki empat kecamatan.

"Saat ini Tanjung Selor masih satu kecamatan, padahal setidaknya untuk kota Tanjung Selor butuh empat kecamatan," ujar Wagub.

Wagub Yansen mengatakan dalam pemekaran juga harus memperhatikan kajian teknis seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi pencapatan daerah, dan lainnya.

Wagub juga berharap daerah seperti Kalimantan Utara diberikan kohesivitas atau pengecualian atas kebijakan insentif yang masih diterapkan pemerintah (pusat) sebagaimana pemekaran empat daerah baru di Papua beberapa waktu lalu.

"Apalagi, Tanjung Selor sudah disebutkan sebagai ibu kota dalam undang-undang pembentukan provinsi ini," tutur Wagub.

Selain Tanjung Selor, Pemprov juga ikut mendorong beberapa DOB lain yang telah diusulkan yakni Kota Sebatik, Kabupaten Rumi Dayak Perbatasan, Kabupaten Krayan, dan Kabupaten Apo Kayan. (Adpim)



Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dr. Yansen TP M.Si dan Bupati TP Bulungan mengapresiasi 42 kecamatan baru dalam pemekaran daerah di lingkungan kabupaten Bulungan.





Gunung Batu Benau jadi Geopark

Pemprov Kalimantan Utara seriusi pengembangan Geopark (Geopark) atau Taman Bumi Gunung Batu Benau di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.

Gubernur Urs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum pada 9 Februari 2023 berjemur Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Dr. Ir. Muhammad Walid terkait hal itu.

Pertemuan itu sekaligus bentuk tindak lanjut pengembangan Geopark Gunung Batu Benau 2.000 hektare antara Pemprov Kaltara dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

"Saya sudah pernah bermalam di dalam goa Gunung Batu Benau, dan di dalam goa sangat luas sekali dan berdekatan dengan sungai yang memiliki arus jeram yang berbatu batu," tutur Gubernur.

Geopark merupakan sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosire) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keanekaragaman Budaya.

Gunung Batu Benau memiliki ciri khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Gunung ini masih dihuni oleh penduduk asli masyarakat Acal Pukan Batu Benau.

"Mereka masih memiliki DNA tersendiri karena belum bercampur baur dengan masyarakat umum lainnya," ujarnya.

Pemprov akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mengevaluasi hasil kajian identifikasi keunikan bentang alam, rekonstruksi proses geologi, struktur batuan, keberadaan fosil, kandungan mineral, dan jenis batuan yang terdapat di Gunung Benau.

"Besar harapan kami supaya Gunung Batu Benau dapat segera ditetapkan sebagai Geopark, dan akan menjadi Geopark pertama di Kalimantan Utara," ujarnya. (Adpim)



Zainal Gunung Batu Benau sebagai kawasan wisata budaya di kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, saat bertemu dengan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Dr. Ir. Muhammad Walid (KPR) dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulungan (KPR).



Angka Perbatasan Baru (Angka Bel Pauang) Suaraku Kabupaten Kutawaringa Kabupaten Kutawaringa (Angka Bel Pauang) (Angka Bel Pauang)

Optimalkan Peran PLBN

Optimalisasi peran pos lintas batas negara (PLBN) dikupas dalam pertemuan Tim Kementerian Koordinator Polhukam (Kemenko Polhukam RI) dengan Pemprov Kalimantan Utara yang dipimpin Wakil Gubernur Dr. Yansen TR M Si di Tanjung Selor, Bulungan, 23 Februari 2023.

Tim Kemenkopolhukam dipimpin Staf Ahli Laksamana Muda TNI Anton Simatupang berbicara banyak tentang penguatan PLBN terpadu dan sarana prasarana penunjang kawasan perbatasan.

Wakil Gubernur Dr. Yansen TR M Si mengemukakan pembangunan sejumlah PLBN oleh pusat di kawasan perbatasan negara di Kalimantan Utara merupakan kebijakan tepat.

PLBN bisa menjadi infrastruktur solutif dalam menjawab tantangan pembangunan perbatasan seperti kesenjangan wilayah, demografis, ketahanan nasional, pelayanan publik, dan aksesibilitas.

PLBN di Kalimantan Utara mencakup PLBN Terpadu Sei Pancang (Nunukan), PLBN Terpadu Long Micang (Nunukan), PLBN Terpadu Labang (Nunukan), dan PLEN Terpadu Long Nawang (Malinau).

"PLBN Sei Pancang dan PLBN Long Micang sudah terealisasi pembangunannya 100 persen. Seluruh PLBN harus digejot dan ditingkatkan untuk segera dioperasionalkan sesuai fungsi dan tujuannya," kata Wagub Yansen TR.

Acapun progres pembangunan fisik PLBN Labang mencapai 77 persen dan PLBN Long Nawang 57 persen. Empat PLBN tersebut masih memerlukan akselerasi sarana penunjang operasional seperti akses jalan dan jaringan listrik, khususnya PLBN Labang dan PLBN Long Nawang.

Untuk mewujudkan PLBN sebagai embrio baru perekonomian masyarakat masih perlu sinergi kebijakan antara pemprov, Pemkab setempat, dan pemerintah pusat.

"Perlu segera didorong kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan selaku pengelola PLBN untuk pengeolaan zona pendukung untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Termasuk segi konektivitas, peningkatan daya saing masyarakat, dan pembangunan sentra perdagangan," ujarnya.

Anggota Staf Ahli Menteri Polhukam Laksamana Muda TNI Anton Simatupang menyebut kawasan perbatasan merupakan wilayah penting dalam konteks nasional dan global. Dalam menjaga keamanan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan yang menjadi isu strategis kawasan perbatasan negara, salah satunya dilakukan dengan menghadirkan PLBN.

"Selain menjadi infrastruktur dalam menghadapi segala ancaman asing, mengatur mobilitas pergerakan manusia dan barang, PLBN juga menjadi embrio pertumbuhan ekonomi suatu wilayah untuk kesejahteraan masyarakat," kata Anton.

Dalam kunjungan ini, ia juga mengagail upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah di Kalimantan Utara dalam mengawal pembangunan dan pengoperasian PLBN.

Termasuk upaya optimalisasi peran PLBN oleh pemerintah daerah, kendala pengelolaan PLBN, serta kesiapan infrastruktur pendukung di keempat PLEN yang dibangun. (Adpim)

PROGRES PEMBANGUNAN PLBN DI KALIMANTAN UTARA

Percepatan Pembangunan PLBN di Kalimantan Utara termasuk bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara, Jepang dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.



PLBN TERPADU LABANG

Analisis Fisik	77,95%
Realisasi Keuangan	60,89% (19 Februari 2020)
Pagu	Rp 211.786.214.000
Keterangan	: Infrastruktur
Pembiayaan Kelembaan	Belum ada akses jalan menuju lokasi PT. PLN, sehingga PT. PLN (Persero) belum bisa melaksanakan kegiatan)

**PLBN TERPADU LONG NAWANG**

Realisasi Hasil	: 61,2641 %
Realisasi Kebutuhan	: Rp. 555. (19 Februari 2022)
Pagu	: Rp 231.232.210.000
Keterangan	: Infrastruktur Pemenuhan
Kidististik	: Jaringan yang ada masih menyugurkan kebel 18 (tegangan Rendah), dengan kondisi jarak renc. ada belum memenuhi syarat untuk disambungkan sampai lokasi PLBM.

**PI RN TERPADU LONG MIDANG**

Realisasi Fisik	: 100%
Realisasi Keuangan	: 100% (Penghentian Kuruk)
Pagu	: Rp 7.511.914,752
Keterangan	: Infrastruktur Penunjang
Kelastikan	: Kabin IR (Tegangan Rendah) PI, PI N (Paisero) sudah ada di depan Labor PI N (tanya pada Timuk sebab dari jaman PI N ke PI BN, tidak terasahung)



PLBN TERPADU SEI PANCANG

Kualitas Teknik	: 100%
Realisasi Keuangan	: 100%
Pagu	: Rp 243.548.117,000
Keterangan:	: Infrastruktur Penunjang
Kelompok	: Sudah bersambung dengan program teknik RD, PUA, (Pembina)

Sedara keseluruhan semua PLN yang telah tersambung jaringan listrik PLN, sudah mendapatkan akses listrik baik dan Pengukuran Panel Surya Skala Kecil maupun pencatatan PLU Diesel (Genset).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas PUPA Perkim juga tengah membangun sarana penunjang seperti pembangunan jalan-jalan sesunde, membangun Toko Indonesia bersama Disperindagkop, membangun pasar, dan membangun sarana prasarana pusat-pusat ekonomi kegiatan masyarakat.



Usia Produktif 70 Persen, Kaltara Masuki Bonus Demografi

Jumlah penduduk usia produktif di Kalimantan Utara mencapai 70,13 persen atau lebih dari dua pertiga dari total jumlah penduduk sehingga provinsi ini disebut memasuki bonus demografi.

"Meningkatnya penduduk usia produktif merupakan sinyal positif bahwa Kalimantan Utara sedang memasuki bonus demografi," kata Wakil Gubernur Dr. Yansen TP, M.Si.

Bonus demografi merupakan kondisi perubahan struktur umum penduduk sebagai akibat dari proses transisi demografi, yaitu penurunan angka kelahiran dan angka kematian. Ia mengatakan, banyaknya penduduk usia produktif menawarkan berbagai peluang, namun jika tidak bisa dimanfaatkan berpotensi memunculkan berbagai permasalahan.

Mayoritas penduduk Kalimantan Utara bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022, jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini adalah sebesar 33,37 persen dari seluruh angkatan kerja yang bekerja atau sebesar 118.121 orang.

Sempat mengalami penurunan sebesar 0,82 persen pada tahun 2021 namun terjadi kembali kenaikan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada 2022 sebesar 2,91 persen atau bertambah 15.122 orang.

Pada 2021 mayoritas penduduk bekerja pada sektor informal yaitu 50,74 persen, namun pada tahun 2022 berubah menjadi mayoritas bekerja pada sektor formal yaitu sebesar 51,00 persen.

Namun demikian dilihat dari pendidikannya, penduduk bekerja di Kalimantan Utara pada 2022 masih didominasi oleh pekerja dengan pendidikan Sekolah Dasar ke bawah dengan persentase sebesar 34,42 persen.

Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit di Indonesia. Kalimantan Utara merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk di bawah satu juta jiwa.

Jumlah penduduk provinsi yang berbatasan dengan Malaysia ini pada 2021 sebesar 713,6 ribu orang dengan tingkat kepadatan mencapai sembilan penduduk/km². Kota Tarakan menjadi daerah dengan penduduk terbesar yaitu 245,7 ribu orang. Kabupaten Tana Tidung menjadi daerah dengan penduduk paling kecil yaitu 26,5 ribu orang.

Kota Tarakan merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 980 penduduk/km², sedangkan Kabupaten Malinau merupakan daerah dengan tingkat kepadatan paling rendah yaitu dua penduduk/km².

Penduduk Provinsi Kaltara tersebar tidak merata. Kota Tarakan masih menjadi daerah dengan jumlah penduduk paling besar walaupun dengan luas wilayah paling kecil. (Adpim)

Calendar of Event Kaltara 2023

Support Event

- Kampung Ramadan - Kab. Bulungan
- Pesona Kicau Mania 2023 - Kab. Bulungan
- Rally Wisata " Jelajah Bulungan 2023 " - Kab. Bulungan
- Mancing Mania 2023 - Kab. Bulungan
- Ziarah Akbar - Kab. Bulungan
- Kaltara Menyeduh - Kab. Bulungan
- Bulungan Grand Prix - Kab. Bulungan
- Bulungan Sultanate Fest 2K23 - Kab. Bulungan
- Upun Taka Fest 2K23 - Kab. Tana Tidung
- Ulang Tahun Desa Pulau Sapi - Kab. Malinau
- Ulang Tahun Desa Pulau Setulang - Kab. Malinau
- Pekan Promosi Budaya Desa Serindit - Kab. Malinau
- Karnaval Budaya & Ulang Tahun Desa Long Lorch - Kab. Malinau
- Ramie O'o Ajo - Kab. Malinau
- Cross Border - Kab. Nunukan

Grand Event

- Iraw Adat Tidung Borneo Bersatu - Kab. Nunukan
- Festival Iraw Tana Tidung - Kab. Tana Tidung
- Iraw Malinau - Kab. Malinau
- Festival Budaya Adat Durrud - Kota Tarakan
- Cap Go Meh - Kab. Bulungan
- Festival Adat Sungai Kayan - Kab. Bulungan

Ultimate Event

- Benuana Fest 2K23

Mega Event

- Kaltara Motor Fest 2K23 - Kab. Bulungan
- Kaltara Begimpor 2K23 - Kab. Bulungan
- Musik Alam Fest 2K23 - Kab. Bulungan
- Iraw Tengkeyu Tarakan - Kota Tarakan



Selamat Idulfutri

1 Syawal 1444 H/2023 M



Hj. Rachmawati, SH.

Ketua TP PKK Kalimantan Utara

Dr. H. Jalni A. Piliang, S.H., M.Hum.

Gubernur Kalimantan Utara

Dr. Yansen T.M.S.

Wakil Gubernur Kalimantan Utara

Peng Yansen

Wakil Ketua TP PKK Kalimantan Utara